

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program pembangunan sosial tak jarang dipandang sebagai cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada pada masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Hari ini, peran komunikasi menjadi sangat penting, terutama dalam pembangunan sosial itu sendiri. Dimana komunikasi sebagai satu-satunya media untuk berbagai elemen yang terlibat dalam berinteraksi. Setiap manusia memiliki dorongan bawaan untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Tujuan mendasar dari komunikasi adalah untuk menyebarkan informasi untuk mempengaruhi pendapat orang, mengubah tindakan mereka, dan menginspirasi mereka untuk mengambil tindakan (Farid Hamid & Heri Budiarto, 2011).

Ketika melihat kenyataan di lapangan, salah satunya dalam membantu proyek-proyek pemerintah, komunikasi menjadi jelas sebagai komponen yang paling penting dalam semua aspek. Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah inisiatif yang disponsori oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal, adalah salah satu contohnya. Dalam hal menyebarkan informasi mengenai tujuan Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah mengalami kesulitan dalam mencari cara untuk melakukannya secara efektif.

Sebagai salah satu elemen dari inisiatif perlindungan sosial di Indonesia, Program Keluarga Harapan (PKH) menawarkan bantuan keuangan kepada keluarga berpenghasilan rendah. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan ini, setiap RSTM harus didokumentasikan dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dari generasi ke generasi adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah telah melaksanakan program PKH sejak tahun 2007. Mungkin ada isu-isu lain yang muncul selama Program Keluarga Harapan (PKH) berlangsung. Ada dua jenis masalah yang muncul selama pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), menurut data penilaian pemerintah. Ada dua jenis tantangan ini: kultural dan struktural. Hambatan struktural pertama adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tidak akurat dan tidak tepat sasaran; yang kedua adalah fasilitas Program Keluarga Harapan (PKH) yang kurang memadai bagi para pendamping; dan yang ketiga adalah kegagalan pemerintah

daerah dalam berkoordinasi dengan para pendamping. Hambatan budaya yang pertama adalah keputusan yang disengaja untuk tidak ikut serta dalam peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH), dan yang kedua adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemberian bantuan. (Ida Yunani Destianti, 2017. Hal. 183)

Wacana yang buruk adalah titik fokus dari masalah program PKH, menurut perspektif ilmu komunikasi. Sejauh mana masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan PKH, termasuk bagaimana dukungan diberikan, tergantung pada frekuensi kesulitan yang dihadapi selama proses tersebut. P2K2 mengacu pada sesi kelompok pendidikan yang dihadiri oleh keluarga yang berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) selain menerima bantuan keuangan, layanan kesehatan dan pendidikan.

Pertemuan P2K2 juga dikenal sebagai sesi Bina Keluarga. Kementerian Sosial melaporkan bahwa keluarga yang menerima bantuan melalui Program Keluarga Harapan ikut serta dalam sesi pembelajaran terstruktur yang disebut Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2). P2K2, singkatan dari “Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga”, bertujuan untuk mempercepat proses perubahan perilaku seseorang dengan menarik perhatian pada pentingnya pengasuhan anak, sekolah, kesehatan, pengelolaan uang, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial. (Pkhjepara, 2021).

Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga mempertemukan para pekerja sosial sukarelawan dari seluruh Indonesia, baik di pusat-pusat kota maupun di pedesaan. Setiap keluarga diundang ke pertemuan peningkatan kapasitas sebulan sekali, atau lebih sering jika diperlukan. Biasanya, pertemuan dilakukan di rumah keluarga penerima manfaat atau di tempat lain yang disepakati bersama. Untuk memaksimalkan potensi mereka, kami ingin “memaksa” keluarga penerima manfaat untuk bertindak secara konstruktif dan bukan destruktif. Dari apa yang terjadi dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), terlihat bahwa para pemangku kepentingan dalam program pemerintah yang baru saja diluncurkan ini tidak berkomunikasi dengan baik satu sama lain. (Tri susanto, Bilpen Nainggolan. 2017.Hal.49)

Berdasarkan data dari penelitian sebelumnya yaitu milik Nurhapni (2018) dengan judul penelitian “Metode Komunikasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam

Memberikan Informasi Kepada Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya” mengirim pesan bahwa ada masalah dengan komunikasi antara asisten dan peserta manfaat ketika mengirim pesan, khususnya 1) beberapa orang tidak memperhatikan saat mengirim pesan. 2) Mayoritas penerima manfaat adalah orang awam, sehingga mereka dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari mana saja, bahkan dari masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan bahkan berita bohong. 3) Sebagian kecil penerima manfaat buta huruf, sehingga sistem mading kurang efektif dalam menyampaikan pesan dan informasi. (Nurhapni, 2018.Hal. 1)

Sebuah penelitian terpisah oleh Zatul Fadhli (2017) meneliti peran “Model Komunikasi” dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Aceh Timur. Temuan kami konsisten dengan temuan dari penelitian lain di mana para partisipan tidak memiliki kejelasan tentang tujuan Program Keluarga Harapan (PKH). Kemampuan kognitif dan tingkat pendidikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki korelasi langsung dengan pemahaman informasi yang disampaikan. Karena pekerjaannya mengharuskannya untuk mengulang-ulang ketika anggota kelompoknya salah paham, ketua kelompok akan lebih menghargai daya serap. Keluarga penerima manfaat hanya peduli dengan hal-hal detail seperti waktu dan jumlah distribusi. Perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum berubah. Beberapa KPM lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sementara di kecamatan lain sudah memenuhi kewajibannya. (Zatul Fadhli, 2017. Hal.1)

Memperoleh dan memahami informasi yang diberikan oleh para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan tantangan tersendiri bagi keluarga penerima manfaat karena tingkat pendidikan mereka yang rendah, menurut penelitian sebelumnya tentang masalah komunikasi. Menginvestigasi masalah ini adalah tujuan dari penelitian ini. Karena penekanan pada komunikasi dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH), penelitian semacam ini sangat penting. Tentu saja, ilmu komunikasi relevan dengan tujuan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga untuk melibatkan peserta dalam mengubah perilaku keluarga penerima manfaat. Menurut Samovar dkk. (2014:17), meyakinkan individu untuk mengubah perilakunya merupakan salah satu tujuan komunikasi. Devito berpendapat bahwa membujuk orang lain di sekitar kita untuk

mengubah perilaku dan pandangan mereka adalah tujuan akhir dari komunikasi (2011: 32). Sudut pandang ini sebanding dengan sudut pandang yang satu ini pada tingkat yang lebih rendah. Sangat mungkin bahwa peserta Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) akan mengalami perubahan perilaku jika mereka mampu memperoleh dan memahami materi secara efektif. Oleh karena itu, para fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) harus menguasai seni komunikasi yang efektif agar dapat mendorong para peserta untuk berperan aktif dalam pertemuan dan membangun rasa percaya diri sehingga dapat memfasilitasi pengembangan komunikasi yang interaktif. Miskomunikasi sering terjadi karena teknik komunikasi yang digunakan tidak efektif, sehingga menimbulkan masalah komunikasi. (Ida Yunani Destianti, 2017. Hal.186)

Studi ini sangat penting untuk mempelajari taktik komunikasi yang digunakan oleh pendamping PKH dalam pertemuan P2K2 PKH karena tantangan implementasi program dapat muncul dari mereka. Yang akan dijadikan bahan analisis skripsi dengan judul “Komunikasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2k2) Di Desa Pakis, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto”

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti telah memberikan beberapa informasi latar belakang; dengan demikian, rumusan masalah berikut ini akan dibahas:

1. Apa saja metode komunikasi yang diterapkan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Desa Pakis Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto?
2. Apa saja hambatan komunikasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Desa Pakis Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto?
3. Apa saja perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan metode komunikasi yang telah diterapkan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Desa Pakis, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada konteks dan pernyataan masalah yang diberikan sebelumnya:

1. Mengidentifikasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan beberapa pendekatan komunikasi dalam Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) di Desa Pakis, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto
2. Mengidentifikasi fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pakis, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, mengalami kesulitan dalam berkomunikasi pada saat pertemuan peningkatan kapasitas keluarga P2K2.
3. Mengidentifikasi pada saat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Desa Pakis, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, melalui penggunaan pendekatan komunikasi yang selama ini digunakan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berkontribusi pada literatur dan memajukan bidang ilmu komunikasi, dengan penekanan khusus pada komunikasi Pertemuan Peningkatan Kapasitas Program Keluarga Harapan.

2. Manfaat Akademis

Untuk digunakan sebagai sumber informasi bagi siapa saja yang tertarik dengan teori atau praktik komunikasi, dan lebih khusus lagi untuk Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga Program Keluarga Harapan dan fokusnya pada komunikasi.

3. Manfaat praktis

Untuk memberikan wawasan tentang seberapa baik fasilitator dan organisasi terkait terlibat dengan keluarga penerima manfaat selama Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga Program Keluarga Harapan.